

Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017

Rt. Ta'sya Ismaya Putri*), Supratiwi), Nunik Retno Herawati**)**

Email: tasyaismayaaa@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl.Prof.H.Soedarto,SH Tembalang Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi pasca jatuhnya Orde Baru akhirnya telah memperkuat kekuasaan orang kuat lokal. Hingga seiring dengan adanya upaya demokratisasi, mereka pun turut menggunakan demokrasi yang ada. Salah satunya adalah para Jawara dan Ulama membangun aliansi dengan pejabat publik. Kondisi yang terjadi di Provinsi Banten ini tidak hanya membuat kedua entitas itu menjadi subkultur yang hidup dalam masyarakat setempat, melainkan sebuah kekuatan riil yang berperan dalam politik lokal di Banten. Basis massanya yang besar dijadikan strategi oleh politisi untuk melibatkan mereka melalui relasi patron klien sebagai upaya memenangkan kontestasi Pemilu. Alhasil, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai relasi patron klien yang terjadi antara politisi serta Jawara dan Ulama dalam Pemilu, khususnya pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dalam upaya memenangkan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori patron-klien menurut Scott (1972). Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan para Jawara, Ulama, dan masyarakat pemilih sebagai pihak yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017. Adapun, para informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* serta *snowball sampling* yang digunakan untuk meraih informan kunci dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi patron klien terjadi di antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama. Hubungan yang dirawat melalui relasi patron klien ini telah teridentifikasi melalui adanya hubungan personal, hubungan resiprositas akibat adanya ketimpangan sumber daya, dan hubungan loyalitas di antaranya. Dalam hal ini, terdapat relasi kluster piramida yang terjadi, yakni relasi patron klien antara Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara serta Ulama, juga antara Jawara dan Ulama dengan masyarakat. Pada gilirannya, Jawara dan Ulama ini dapat memobilisasi masyarakat sekitar untuk memilih pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

Penelitian ini menyarankan untuk adanya studi lebih lanjut perihal relasi patron klien dalam Pemilu. Kekurangan dalam mendapatkan akses informasi perihal pemberian secara personal yang mungkin terjadi pada tokoh strategis diharapkan menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya untuk melengkapi. Lebih lanjut, studi yang melengkapi diharapkan memperkaya referensi akademis serta referensi dalam memperbaiki keberlangsungan Pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Relasi Patron Klien, Jawara, Ulama.

ABSTRACT

The decentralization policy after the fall of the New Order has finally strengthened the power of local strongmen. Along with the democratization efforts, they also use the existing democracy. One of them is the Jawara and Ulama building alliances with public officials. This condition in Banten Province not only makes the two entities a subculture that lives in the local community, but a real force that plays a role in local politics in Banten. Its large mass base is used as a strategy by politicians to engage them through patron-client relations as an effort to win the election contestation. As a result, this research aims to explain the patron-client relationship that occurs between politicians and Jawara and Ulama in elections, especially in the 2017 Banten Governor Election in an effort to win Wahidin Halim and Andika Hazrumy.

This research uses qualitative research methods with a case study approach. The theory used in the research is the patron-client theory according to Scott (1972). Data were collected based on interviews with Jawara, Ulama, and the voting public as parties involved in the 2017 Banten Governor Election. The informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques to reach key informants in the research.

The results of study show that patron-client relations occurred between the Wahidin Halim and Andika Hazrumy pair with Jawara and Ulama. The relationship maintained through this patron client relationship has been identified through the existence of personal relationships, reciprocity relationships due to resource inequality, and loyalty relationships between them. In this case, there is a pyramid cluster relationship that occurs, namely the patron client relationship between Wahidin Halim and Andika Hazrumy with the Jawara and Ulama, as well as between the Jawara and Ulama and the community. In turn, these Jawara and Ulama can mobilize the surrounding community to vote for Wahidin Halim and Andika Hazrumy.

This research suggests further studies on patron-client relations in elections. The lack of access to information about personal gifts that may occur to strategic figures is expected to be the basis for further research to complement. Furthermore, complementary studies are expected to enrich academic references and references in improving the sustainability of elections in Indonesia.

Keywords: *Patron-Client Relationship, Jawara, Ulama.*

**) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau yang biasa disebut Pemilu adalah sebuah mekanisme partisipasi rakyat dalam negara untuk memilih calon pemimpin sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2006). Lebih lanjut, Sardini (2011) menjelaskan Pemilu adalah pilar utama dalam negara untuk mengakumulasi kehendak masyarakat. Hal ini tentu membuat pelaksanaan Pemilu sebagai karya politik gerakan reformasi begitu memiliki pengaruh mendasar dalam penyelenggaraan negara, sehingga keberlangsungannya harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Atas dasar tersebut, pemerintahan yang berasaskan demokrasi harus menyertai mekanisme dan institusi sebagai ekspresi serta kehendak yang diwakili. Harapannya adalah timbul perubahan bagi daerah yang dipimpin, sehingga menghasilkan kepemimpinan yang diinginkan oleh rakyat.

Pemilu dihadirkan sebagai buah dari desentralisasi yang digadang-gadang menjadi pembukaan kran demokrasi seluas-luasnya. Namun demikian, dalam tatanan empirisnya desentralisasi ternyata tidak serta merta menjadikan panggung politik lebih demokratis. Justru hal tersebut dapat kontraproduktif bilamana menghasilkan bos lokal (*local bossism*) dan juga orang kuat lokal (*local strongmen*) di dalamnya (Sutisna, 2017). Sebab, kehadiran local strongmen ini nyatanya dapat menghasilkan politik patrimonial sebagai bentuk pengaruh elite yang membangun hubungan patrimonialistik (Bultmann, 2018).

Banten dikenal dengan daerah yang memiliki orang kuat lokal serta telah mengakar di berbagai daerah. Tb. Chasan Sohib, contohnya, bos lokal ini berperan dalam membangun dinasti politik sebagai

local strongmen yang terjamah dan terprogram. Eksistensi Tb. Chasan Sohib telah hadir sejak masa Orde Baru (Orba). Sebelumnya, Tb. Chasan Sohib telah menjadi penyedia kebutuhan logistik bagi tentara di Divisi Siliwangi pada 1967 (Syauket, 2021). Tb. Chasan Sohib sering menang atas kontrak pembangunan di Banten. Lebih jauh lagi, Tb. Chasan Sohib pada masa Orba bersama Jaringan Warga (Jawara) serta Ulama setempat memiliki posisi sebagai pemimpin informal yang berafiliasi dengan partai terkuat saat itu, yakni Golongan Karya (Golkar). Jelas, fenomena bos lokal ini memang tidak terlepas dari terjadinya konversi dari modal sosial menjadi modal politik. Modal tersebut justru telah menjadi pondasi penting bagi eksistensi dinasti politik di Banten hingga saat ini.

Provinsi Banten memiliki tokoh informal yang kuat dan memiliki posisi sebagai elite lokal di tengah masyarakat, yakni Jawara dan Ulama. Entitas ini memang hadir sebagai hasil dari kolusi bisnis dan politik di aras lokal. Jawara maupun Ulama memiliki massa yang besar, sehingga seringkali menjadi media untuk menimbulkan adanya mutualisme kepentingan. Hubungan tersebut timbul atas mekanisme pertukaran kepentingan, yakni tokoh informal meraih aksesibilitas terhadap pembuatan kebijakan publik, sedangkan dinasti politik tersebut dapat mengikat loyalitas pemilih melalui pengaruh tokoh informal (Djati, 2013). Tentu saja fenomena ini dapat berperan dalam konstelasi internal untuk mengamankan kekuasaan politik patrimonial di daerah tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinasti politik di Banten sukses dalam memanfaatkan jaringan patrimonialisme yang dibangun Jawara

serta Ulama selaku aktor penguasa tradisional di Banten. Walaupun demikian, pada tatanan empirisnya, penampilan Jawara secara politik terlihat mendominasi, tetapi tidak mengubah posisi sosial Ulama sebagai tokoh agama (Pribadi, 2011). Hingga pasca otonomi daerah, posisi Ulama akhirnya berubah dari *cultural broker* menjadi *political broker* (Hamid, 2010).

Loyalitas dari Jawara dan Ulama menjadi salah satu faktor dari dinasti ini berperan dalam mempertahankan kekuasaannya di Banten. Bahkan, posisi distribusi kekuasaannya telah menjalar ke berbagai lini pemerintahan, baik dalam lingkup eksekutif maupun legislatif. Salah satunya Andika Hazrumy, cucu dari Tb. Chasan Sohib yang merupakan anak dari Ratu Atut akhirnya menjadi Wakil Gubernur Banten yang terpilih pada Pemilihan Gubernur 2017. Andika Hazrumy bersama Calon Gubernur Banten pada 2017 itu, yakni Wahidin Halim menang dengan posisi 2.411.213 jumlah suara sah pemilih, mengungguli petahana Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang memiliki jumlah suara sah 2.321.323.

Menjadi hal yang istimewa bagi Wahidin Halim dan Andika Hazrumy untuk menang melawan petahana yang tentunya memiliki tingkat elektabilitas lebih tinggi. Banyak faktor yang menjadi alasan kemenangan bagi kandidat tersebut, tetapi salah satu di antaranya memuat faktor relasi patron-klien antara pasangan terkait dengan Jawara dan Ulama di Banten. Terdapat peran Jawara dan Ulama di dalamnya yang menjadi "*invisible hand*" aras kemenangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy pada Pemilihan Gubernur 2017 kemarin.

Berkaca dari sekilas profil di atas, sebenarnya hal demikian juga yang

menjadikan landasan peletakan Wahidin Halim sebagai calon gubernur dan Andika Hazrumy sebagai wakilnya. Menurut Jazuli Abdillah selaku tim sukses Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dalam penelitian Puri (2018), setelah melalui berbagai hasil survei, Wahidin Halim ditetapkan oleh Partai Demokrat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Di sisi lain, Wahidin Halim pada saat itu belum mengetahui wakil untuknya. Hingga survei internal Partai Golkar pun memutuskan Andika Hazrumy dan terjadi koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Adapun pertimbangan pemilihan wakil terhadap Andika Hazrumy ini didasarkan pada posisi Andika Hazrumy yang populer dan memiliki kekuatan jaringan. Salah satunya ada pada basis keluarga Andika Hazrumy yang merupakan keluarga dari Tb. Chasan Sohib dan merupakan keluarga Jawara (Puri, 2018).

Nyatanya, Ratu Atut yang terjerat dalam tindak pidana korupsi tidak mematikan kekuasaan basis familisme di daerah ini. Sebab, pilar dinasti tersebut terletak pada dua dimensi, yakni aspek struktur politik dengan Golkar yang mempunyai struktur dan jaringan kuat serta legitimasi tradisional dari tokoh masyarakat seperti Jawara dan Ulama. Kekuatan basis massa ini tidak terlepas dari adanya pemupukan loyalitas yang dibangun dari relasi patron-klien di dalamnya.

Menyoal perihal relasi patron-klien, banyak istilah lainnya yang ditemukan namun merujuk pada kesamaan makna, seperti "klientelisme", "patronase", atau "patron-klien). Penelitian ini akan merujuk pada istilah "patron klien" yang dimaknai oleh Scott (1972) sebagai sebuah pertukaran diadik (dua pihak) yang terdiri

dari figur dalam posisi kekuasaan untuk memberikan keamanan, kebijakan, ataupun keduanya dengan pengikut pribadi sebagai imbalan atas manfaat tersebut. Pemberian diberikan kepada para pengikutnya akibat telah menyumbangkan kesetiaan dan bantuan pribadi mereka. Adapun, status patron di sini adalah seorang individu yang berada dalam sosial ekonomi lebih tinggi dengan menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk memberikan perlindungan dan keuntungan. Sedangkan, posisi klien adalah pihak yang memiliki status lebih rendah dan akan membalas serta menawarkan kepada patron berupa dukungan dan bantuan.

Penelitian seputar “patron klien” dalam ranah ilmu politik masih didominasi oleh fokusnya pada relasi suara dengan menjadikan politisi selaku patron dan pemilih sebagai klien. Relasi suara di sini biasanya diartikan pada penargetan uang, barang, ataupun bantuan yang akan memengaruhi pemilih (Yıldırım dkk., 2020). Akan tetapi, perlu ditelisik kembali bahwa kenyataannya relasi patron klien yang justru tidak kalah kuat pun dasarnya hadir dari posisi lingkaran elite sang politisi. Fajriyah (2019) misalnya, mengungkapkan kontestasi dalam Pemilu tidak terlepas dari adanya dukungan yang diberikan oleh elite. Dukungan tersebut tentunya disertai dengan kepentingan elite dalam memberikan dukungan politik. Upayanya semakin kuat ketika dukungan terlihat saat calon menjelang pemilihan. Di sisi lain, elite di luar lingkaran kekuasaan seperti pengusaha pun turut berperan dalam relasi ini. Pengusaha yang memiliki kedekatan dengan elite politik dapat menjadi penyedia bagi kebutuhan-kebutuhan kontestasi. Keterlibatan yang kuat dari segi ekonomi ini jelas akan

menguntungkan pengusaha. Hal ini diungkapkan dalam penelitian Hidayat (2021) yang menjelaskan relasi tersebut dapat diketahui dengan adanya pengusaha yang melindungi kepentingannya dengan menjalin relasi individu maupun informal pada aktor politik.

Bentuk loyalitas dari Jawara maupun Ulama tersebut jelas dapat menjadi modal pendukung juga bagi Wahidin Halim dan Andika Hazrumy untuk bisa maju terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Banten. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menelisik “invisible hand” yang melibatkan relasi patron-klien di dalamnya. Terlebih lagi, provinsi terkait dikenal sebagai provinsi dengan kelompok informal yang kuat, seperti jaringan Jawara dan Ulama (Saragintan dan Hidayat, 2007).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi patron-klien dalam kemenangan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama pada Pemilihan Gubernur Provinsi Banten tahun 2017.

KERANGKA TEORI

Pemilihan Gubernur (Pilgub)

Sebagaimana kita ketahui, pergulatan pemikiran perihal gagasan kedaulatan rakyat di Indonesia telah melalui proses yang panjang. Hingga akhirnya, perubahan nomenklatur perihal posisi kedaulatan rakyat terjadi pada amandemen ketiga UUD 1945, sehingga kedaulatan tertinggi jatuh pada tangan rakyat (Lubis, 2016). Perubahan gagasan tersebut telah menjadikan rakyat sebagai pemegang mandat terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Pasca reformasi, terdapat suatu upaya keseriusan negara dalam mewujudkan desentralisasi yang akhirnya menghendaki terjadinya Pemilihan Umum

Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada dilakukan sebagai terobosan baru dalam pemerintahan lokal di Indonesia. Sebab sebelumnya, kepala daerah dipilih melalui proses politik yang tidak melibatkan rakyat. Sebagaimana yang diungkapkan Arrsa (2014), Pilkada tidak lain merupakan sebagai momentum dalam suksesi kepemimpinan sebagai upaya menerapkan demokrasi yang partisipatif. Mutlaknya salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum adalah untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (Asshiddiqie, 2006). Adapun, pelaksanaan Pilkada ini memuat pemilihan terhadap gubernur untuk tingkatan provinsi, walikota untuk tingkatan kota, dan bupati untuk tingkatan kabupaten.

Mengenai pemilihan gubernur (Pilgub), pemilihan ini dikehendaki untuk pemimpin yang akan memimpin suatu provinsi secara langsung oleh rakyat. Konstitusi secara langsung menjelaskan bahwa Pilgub harus dilaksanakan dengan cara demokratis. Pilgub yang juga sebagai bentuk Pemilu tentunya mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilgub sebagai kegiatan pemilihan umum yang diamanahi oleh UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kegiatan Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada daerah otonom terkait. Harapannya, penggunaan hak rakyat untuk memilih

pemimpinnya ini dapat mewujudkan sistem politik yang lebih berkualitas sekaligus sebagai upaya pendewasaan partai politik, penyelenggara Pemilu, mediamassa, dan pemilih. Adapun, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada tentu tidak menjadi aktor tunggal dalam keberhasilan pelaksanaan Pilkada. Partai-partai politik dan kandidat yang turut meramaikan Pilkada pun berperan dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka dalam Pilgub sebagai esensi Pemilu. Sistem proporsional terbuka ini menghendaki pemilih untuk memilih sesuai dengan pilihannya pada kertas suara (Yanuarti dkk., 2018). Atas hasil pemilihan nanti, keterpilihan kandidat dalam Pilgub ditentukan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak yang diraih dari tempat pemungutan suara.

Sejak ketetapan akan dilaksanakannya Pilgub sebagai bagian dari Pilkada, sebenarnya sudah diperkirakan akan munculnya permasalahan-permasalahan (Marijan, 2007). Pada satu sisi, Pilgub memang dipandang sebagai bagian dari otonomi daerah sekaligus upaya menerapkan nilai-nilai demokratis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata Pilgub dapat melestarikan elite yang berjaya sejak Orde Baru. Fenomena tersebut nyatanya menjadi akar dari adanya elite-elite lokal daerah, seperti Jawara maupun Ulama sebagai elite lokal di Provinsi Banten. Kedua entitas tersebut berpartisipasi untuk terlibat dalam ranah kekuasaan ataupun sebagai pendukung penguasa untuk maju dalam pemilihan. Keterlibatan mereka memuat relasi patron-klien di dalamnya. Olehsebab itu, penelitian ini akan berusaha menelisik perihal relasi patron-klien

antara Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Pemilihan Gubernur tahun 2017.

Patron Klien

Konsep relasi patron klien sebenarnya menimbulkan keberagaman tersendiri karena banyak ilmuwan yang memaknainya dengan istilah berbeda. Adapun, tulisan ini akan merujuk pada istilah patron-klien yang diteorikan oleh Scott, karena teori terkait masih relevan dengan pesta demokrasi (Pemilu) saat ini (Ansyari dkk., 2019). Menyoal patron-klien, Scott (1972) memaknainya sebagai hubungan pertukaran diadik (dua orang) yang terikat satu sama lain melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dari sosial ekonomi memiliki status (patron) karena menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan ataupun keuntungan. Sedangkan, untuk orang dengan status lebih rendah (klien) akan membalas dengan menawarkan dukungan serta bantuan kepada patron.

Scott (1972) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hubungan patron klien adalah hubungan yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Patron pada posisinya menjadi pihak yang berada dalam kedudukan untuk membantu klien. Sedangkan, klien di sisi lain akan membalas dengan menawarkan bantuan yang diperlukan oleh patron. Scott merujuk relasi patron-klien pada hubungan antar individu dengan posisi sosial & ekonomi yang tidak sama. Scott memosisikan patron sebagai pemasok barang dan jasa yang dibutuhkan klien untuk kesejahteraannya, sedangkan klien menerima barang atau jasa yang membuatnya menjadi terikat dengan patron. Hubungan tersebut menjadi kuat bahkan menjadi norma yang mempunyai

kekuatan moral berisi hak dan kewajiban di antara kedua pihak. Imbalan yang diberikan klien bukan imbalan berupa materi melainkan dalam bentuk lainnya. Patron tidak akan mengharapkan materi atau uang dari klien tapi mengharapkan imbalan lain yang dibutuhkan patron. Norma tersebut akan tetap dipertahankan selama memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi klien.

Scott menjelaskan perihal ciri-ciri dari relasi patron klien dalam hubungannya. Ciri-ciri relasi patron klien tersebut memuat tiga hal sebagai berikut:

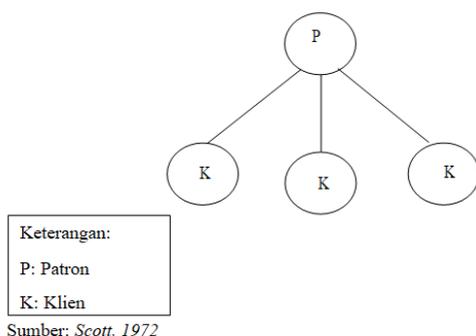
1. Hubungan personal yang merupakan hubungan bersifat langsung serta intensif antara patron dan klien. Alhasil, hubungan yang terjadi tidak hanya berdasarkan motif keuntungan saja, melainkan unsur perasaan akibat hubungan yang bersifat pribadi. Perasaan yang muncul bersifat emosional dan muncul dari jati diri manusia. Di dalam hubungan personal ini terdapat juga unsur saling percaya.
2. Hubungan loyalitas yang berarti kesetiaan dan kepatuhan. Kepatuhan seorang patron terhadap klien ataupun sebaliknya salah satunya dicirikan melalui adanya aturan yang telah disepakati.
3. Hubungan resiprositas yang merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pemberian dan penerimaan ini terjadi karena adanya ketimpangan sumber daya walau dalam kadar yang tidak seimbang.

Dalam hubungan patron-klien, pertukaran yang terjadi merupakan jalinan rumit dan berkelanjutan yang akan terhapus dalam jangka panjang. Dalam

memahami hubungan patron klien, ada satu hal penting yang mendasari hubungan ini. Hubungan patron klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, sementara bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas barang tersebut (Scott, 1972). Hingga akhirnya, patron-klien berkembang dan berbeda dari jenis pertukaran sosial sebelumnya meski masih terdapat persamaan di dalamnya berupa penegakkan pola pertukaran. Akan tetapi, pada jenis ini terjadi pelemahan ikatan antara patron & klien akibat modernisasi sosial-ekonomi. Telah terjadi perubahan berupa partai politik yang kini terstruktur bahkan relatif birokratis, sehingga menggantikan tuan tanah dan tokoh lokal.

Secara garis besar, Scott (1972) mengategorikan relasi patron klien ke dalam dua kelompok, yakni kategori kluster dan kategori piramida. Adapun, kategorisasi ini didasarkan pada perluasan dari jaringan tunggal patron-klien yang ternyata bisa diperluas.

Relasi Patron-Klien dalam Kelompok Kluster



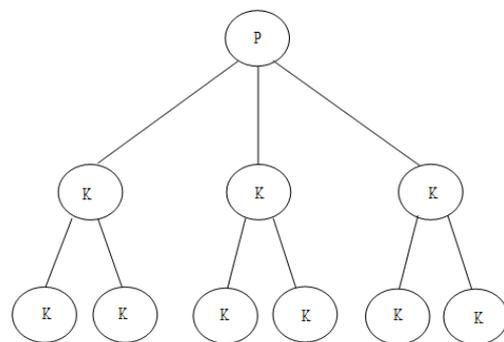
Sumber: Scott, 1972

Konteksnya dalam gambar di atas adalah pengelompokan berdasarkan jalur relasi langsung antara patron selaku pusat serta sejumlah klien, maka hal demikian disebut sebagai “Kluster”. Relasi patron

klien pada konteks ini umumnya bersifat vertikal, yakni patron berada di atas klien.

Kondisi akan berbeda bilamana pengelompokan berdasarkan pada relasi antara satu patron sebagai pusat yang di bawahnya diikuti secara langsung oleh sejumlah klien yang turut menjadi “patron” dengan “klien” nya masing-masing. Atas hal tersebut, kondisi ini dinamakan sebagai “Piramida”. Dalam kategori kelompok Piramida, saat klien memiliki “klien” nya, maka secara vertikal ia akan memiliki hubungan resiprositas yang berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan ketika saat menghadapi klien, ia akan menjadi patron yang masih setia dengan patronnya dan memperlakukan klien sesuai kehendak patron. Konteks pengelompokan patron klien ini tergambar pada gambar di bawah yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan

Relasi Patron-Klien dalam Kelompok Piramida



Keterangan:
P: Patron
K: Klien

Sumber: Scott, 1972.

patron klien yang horizontal. Antar patron terjadi hubungan yang relatif setara, masing-masing patron menjalankan hubungan yang diadik lalu secara lanjut menjalani aliansi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis perihal bagaimana relasi patron klien antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni reduksi data, proses penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Subjek penelitian merupakan narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi perihal situasi serta kondisi latar yang akan diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah Wahyu Nurjamil (Ketua Umum Kesti Tjimande Tarikolot Kebon Djeruk Hilir), Muhammad Ridho (Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Cabang Tjimande Tarikolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH) Kota Serang), Zainudin (Guru Besar Kesti Macan Guling), Donni Irawan (Pengurus Ranting Kesti Macan Guling), K.H. Gus Robi (Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang), K.H. Tubagus Chudori Yusuf (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang), Amin (Masyarakat Cimuncang, Kota Serang, Provinsi Banten), dan K.H. Hamdan Suhaimi (Ulama Nahdlatul Ulama Banten).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Segala upaya demokratisasi di Indonesia, seperti perwujudan otonomi daerah tentunya melalui proses penyesuaian atas perubahan politik yang berlangsung cukup rumit. Salah satu kerumitan-kerumitan ini di antaranya adalah munculnya elite lokal daerah yang justru dapat memengaruhi keberlangsungan Pemilu dalam era otonomi daerah. Posisinya sebagai elite

lokal seringkali menjadi perhatian bagi politisi untuk membangun suatu hubungan kerja sama berupa relasi patron klien. Pada konteksnya, pembahasan kali ini akan menganalisa seputar relasi patron klien pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama pada Pilgub Banten tahun 2017.

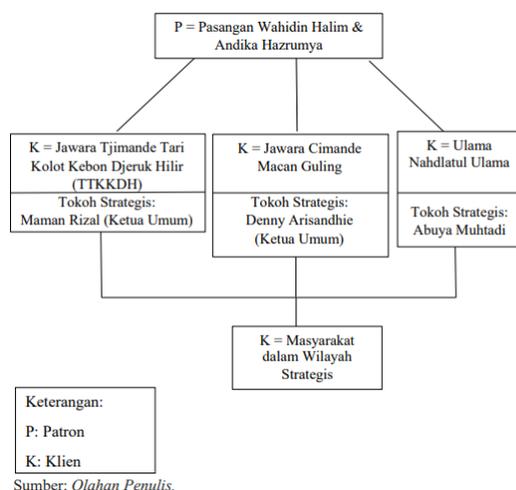
1. Peta Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dengan Jawara dan Ulama

Kedekatan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama adalah sebuah hubungan personal yang justru menjadi modal sosial, walaupun pendekatan yang dilakukan oleh Wahidin Halim hanya pada masa Pemilu. Solidaritas dari Jawara dan Ulama ini meliputi aktor berupa elite-elite sosial yang berpengaruh dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Saat Tb. Chasan Sochib masih hidup, Jawara di Banten memiliki kiblath ke arahnya. Namun, saat ini posisi kiblath telah mengarah pada ketua umum, pengurus kota ataupun kabupaten, hingga guru besar dalam suatu perguruan. Letak strategis dalam suatu perguruan dinilai sebagai Jawara yang berpengaruh. Terutama posisi sebagai ketua umum, organisasi seperti TTKKDH dan Cimande Macan Guling memiliki sumpah kesetiaan yang disebut sebagai "*pertalekan*". Artinya, setiap anggota dari organisasi tersebut harus mematuhi instruksi dari ketua umum. Tidak terkecuali dalam keputusan politik, hal demikian dilakukan oleh ketua umum melalui pemberian instruksi yang secara otomatis anggota TTKKDH ataupun Cimande Macan Guling harus mengikutinya.

Ulama karismatik yang hingga saat ini dinilai berpengaruh dalam perpolitikan Banten adalah Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi pun dinilai oleh kalangan Jawara

sebagai tokoh berpengaruh akibat kesahihannya dan kemahfumannya terhadap ilmu agama. Posisinya sebagai tokoh agama yang karismatik ini dalam Pilgub Banten 2017 kemarin pun menyatakan hak pilihnya terhadap pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

Kemampuan kepemimpinan Wahidin Halim sudah terbukti dengan pengalaman karir politiknya dari tingkat desa hingga sebagai Walikota Tangerang tahun 2003-2013. Melalui hasil wawancara dengan para narasumber, jejak politik Wahidin Halim ini yang turut diyakini Jawara maupun Ulama dapat menang dalam pemilihan, sehingga mereka berpihak pada pasangan tersebut untuk bisa dekat dengan kekuasaan. Berdasarkan analisis di atas, penulis merincikan pemetaan aktor relasi patron klien dalam kemenangan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai berikut:



Secara teknis, penjelasan lebih lanjut mengenai analisis relasi Wahidin Halim dan Andika Hazrumy selaku patron dengan Jawara serta Ulama terhubung oleh upaya penyatuan kepentingan di antaranya. Jawara Kesti TTKKDH dan Cimande Macan Guling serta Ulama NU memiliki

pengaruh bergerak pada bidangnya masing-masing untuk memaksimalkan suara organisasi. Tokoh dari setiap perwakilan golongan memainkan fungsinya sebagai pimpinan yang dapat memengaruhi anggotanya.

2. Menelisik Relasi Patron Klien Bekerja Antara Pasangan Wahidin Halim dengan Jawara dan Ulama

➤ Relasi Patron Klien Antara Pasangan Wahidin Halim & Andika Hazrumy dan Jawara

a. Hubungan Personal Antara Pasangan Wahidin Halim & Andika Hazrumy dengan Jawara

Pola relasi atas dasar hubungan personal akan merujuk pada terjadinya relasi patron-klien. Hubungan ini menurut Scott bersifat langsung serta intensif antara patron dan klien. Hubungan personal juga tidak terlepas dari pondasinya akibat terdapat pertukaran jasa ataupun balas budi.

Terhusus hubungan Andika Hazrumy dengan TTKKDH dan Cimande Macan Guling, nyatanya tidak hanya berlaku pada saat Pemilu saja. Kakeknya, yakni Tb. Chasan Sochib memiliki peranan yang signifikan hingga berdampak dalam membentuk hubungan antara Andika Hazrumy dengan Jawara. Tb. Chasan Sochib adalah tokoh yang dikenal oleh kalangan Jawara sebagai orang yang berperan dalam pendirian Banten. Pada masa pembentukan Banten kala itu, Tb. Chasan Sochib dinilai oleh Jawara sebagai "Orang yang memiliki Banten". Di sisi lain, Tb. Chasan Sochib ini dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam kebudayaan Banten. Perannya begitu besar dalam mempersatukan penggiat silat, sehingga Tb. Chasan Sochib dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar serta dihormati oleh kalangan

Jawara. Dengan demikian, kedekatan Jawara dengan Andika Hazrumy masih ada korelasinya dengan hubungan turun temurun serta persahabatan pada masa lalu. Di sisi lain, hubungan personal antara Wahidin Halim dengan Jawara ini terjalin ketika masa kontestasi Pemilu. Bahkan, pasangan ini saat mendekati Pemilu dinilai selalu menginisiasi kegiatan-kegiatan untuk perguruan, yang sebenarnya intensitas ini tidak terjadi pada masa-masa di luar Pemilu.

b. Hubungan Resiprositas (Timbal Balik)

Antara Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara

Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini adalah sebuah bentuk hubungan timbal balik yang sangat niscaya dalam ruang politik. Hubungan ini terjadi akibat adanya pihak-pihak yang memiliki perbedaan dari kekuasaan, ekonomi, dan sosial (Nastain & Nugroho, 2022). Akibatnya, pihak-pihak yang menjalin hubungan tersebut pun mengalami ketergantungan. Menurut Scott, pemberian dan penerimaan dalam hubungan ini terjadi walau dalam kadar yang tidak seimbang.

Relasi patron klien dalam Pilkada Banten tahun 2017 dalam relevansinya dengan asas timbal balik dengan TTKKDH dan Cimande Macan Guling jelas terjadi. Salah satu tanda dari suatu relasi patron-klien adalah terdapat kesepakatan tidak tertulis di antara keduanya. Bentuk dukungan tersebut nyatanya tidak terlepas dari upaya pendekatan dengan pihak yang memiliki kekuasaan untuk mendapatkan akses dalam mewujudkan kemaslahatan organisasi. Sebab, organisasi masyarakat ini tentu dalam keberlangsungannya butuh menyediakan kaos, membeli kendang, membuat padepokan, dan membuat

sekretariat. Posisi ketimpangan ini dilihat dari segi organisasi terkait yang hakikatnya sebagai penggiat seni budaya namun memiliki kemampuan yang terbatas.

Pada saat Pilgub 2017 di Banten kemarin, TTKKDH salah satunya mendapatkan manfaat pemberian berupa lima kendang dan juga pemberian baju dengan perumpamaan sebanyak satu ribu. Pemberian dana hibah untuk menggerakkan organisasi sebagai upaya pembinaan pun didapatkan oleh TTKKDH.

Hubungan saling ketergantungan ini tidak hanya berlangsung pada Pemilu saja. Baik dari TTKKDH maupun Cimande Macan Guling dapat turut memberi aspirasi demi kemaslahatan organisasinya. Pemberian yang diberi oleh pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dalam hal ini dapat berupa suatu kebijakan dari provinsi ataupun pribadi untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Sebab, politik pertukaran tidak hanya melibatkan manfaat secara pribadi, melainkan dapat berupa sumber daya negara yang didistribusikan berdasarkan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, dalam kaitannya politik pragmatik ini hanya ditujukan pada sekelompok yang turut terlibat dalam kontrak politik.

Politik pragmatik dirasakan oleh Jawara seperti TTKKDH dan Cimande Macan Guling yang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Kemaslahatan yang didapatkan melalui dukungan yang diberikan adalah berupa adanya akses dalam bantuan keuangan untuk organisasi TTKKDH dan Cimande Macan Guling. Di sisi lain, anggota organisasi tersebut pun mendapatkan manfaat lainnya selama kepemimpinan

Wahidin Halim dan Andika Hazrumy berlangsung. Setidaknya mereka dapat menikmati berbagai acara budaya, perlombaan persilatan, pesta tertentu, dan acara organisasi mereka yang didanai oleh politisi terkait. Adapun perihal kebijakan yang dirasakan adalah berupa pemberian matras kepada setiap perguruan dan pengadaan festival seni yang berasal dari dana APBD setempat.

c. Hubungan Loyalitas Antara Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara

Sebagai penggiat budaya, Jawara mendapatkan dana dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Diaspora) yang masuknya ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) lalu akan disalurkan ke cabang-cabang perguruan. Namun demikian, dana mutlak untuk pembinaan dari Diaspora sebagai bagian dari pembinaan dalam perguruan ini belum ada. Bekerja sama dengan para petinggi dijadikan langkah dalam membuat perguruan, setidaknya sedikit terpedaya dengan hibah yang ada. Kondisi ketimpangan seperti ini jelas membuatnya bergantung dengan calon politisi layaknya pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

Solidaritas yang dimiliki Jawara dalam memilih Andika Hazrumy ini sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, antara lain: **Pertama**, yakni *sepertalekan*. Artinya Andika Hazrumy dengan anggota dari Jawara TTKKDH maupun Cimande Macan Guling masih dalam ikatan satu keluarga. Posisi Andika Hazrumy yang masih menjadi keturunan dari Pendekar Banten, yakni Tb. Chasan Sohib membuat para Jawara begitu solid mengingat jasa Tb. Chasan Sohib dalam membentuk Provinsi Banten juga budaya persilatan di Banten. Pembentukan perguruan sebagai upaya pelestarian

budaya dilakukan oleh Tb. Chasan Sohib ternyata membuat kesan dari kalangan Jawara sebagai jasa besarnya. Akhirnya, Andika Hazrumy dan kerabatnya pun turut disertakan kemenangannya dalam Pemilu.

Kedua, keterikatannya dengan Partai Golkar. Baik dari TTKKDH maupun Cimande Macan Guling, keduanya memang cenderung untuk pemilihan kepala daerah akan memilih calon dari Partai Golkar. Sebab, TTKKDH dan pada saat Orde Baru secara organisasi menyesuaikan pemerintah saat itu, yakni ada irisannya dengan Partai Golkar. Begitupun dengan Cimande Macan Guling yang menjadi turunan dari TTKKDH. Hal demikian terwarisi hingga saat ini, karena sebagian besar dalam level kepengurusan TTKKDH ataupun Cimande Macan Guling pada tingkat kota, kecamatan, ataupun kelurahan adalah bagian dari Partai Golkar. Bahkan, Maman Rijal, Ketua Umum TTKKDH pada saat itu adalah anggota DPRD Serang yang berasal dari Partai Golkar. Alhasil, keputusan sebagai hasil dari rapat pengurus jelas menjadi bias akibat pengurus dari TTKKDH maupun Cimande Macan Guling sendiri yang didominasi dari Partai Golkar.

Ketiga, adanya kontrak politik berupa perjanjian bilamana akhirnya dapat terpilih dapat memperkuat loyalitas dari entitas ini. Pemilu dapat dijadikan momentum bagi organisasi-organisasi tersebut untuk dekat dengan kekuasaan dan meraih dana hibah. Upaya pendekatan dengan mendukung Wahidin Halim dan Andika Hazrumy ini jelas adalah sebuah upaya bagi TTKKDH dan Cimande Macan Guling untuk mendukung pemberdayaannya.

Ditemukan dalam (Radar Banten, 2016), terdapat Satgas TTKKDH yang justru tidak satu suara dengan organisasi

induk. Mereka menyatakan dukungannya kepada Rano Karno dan Embay Mulya Syarief pada Pilgub Banten tahun 2017. Ternyata dalam organisasi TTKKDH terdapat perpecahan dengan nama yang sama dalam mendukung ketua umum, calon gubernur, dan upaya mendukung hal lainnya. Dalam hal ini terlihat bahwa perpecahan tersebut adalah sebuah upaya dari pecahan TTKKDH dalam mencari patron, selain dari organisasi induk yang justru melekat pada Golkar.

➤ **Relasi Patron Klien Antara Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Ulama**

a. Hubungan Personal Antara Pasangan Wahidin Halim & Andika Hazrumy dengan Ulama

Membicarakan hubungan personal adalah suatu hubungan yang memang bersifat langsung serta intensif antara patron serta klien yang menyebabkan hubungan yang terjadi ini tidak hanya bersifat semata-mata bermotifkan suatu keuntungan, melainkan mengandung unsur perasaan yang terdapat dalam hubungan personal. Hubungan yang mengandung unsur emosional ini menimbulkan sikap saling percaya serta keakraban antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Ulama NU. Nyatanya, hubungan personal ini turut diraih oleh Andika Hazrumy dari kalangan NU diakibatkan pula pada posisi Andika Hazrumy yang juga turut menjadi bagian dari Pengurus Wilayah NU Banten (PWNU Banten) dengan menjadi bagian sebagai Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Pendahulu Andika Hazrumy pun dikenal sebagai pihak yang dekat dengan Kiai NU dan berjasa bagi NU, salah satunya pada masa Ratu Atut telah dibangun kantor PWNU Provinsi Banten.

Perihal kedekatan Wahidin Halim dengan Ulama NU turut dilakukan olehnya pada masa-masa Pemilu dengan mendatangi kantor PWNU ataupun mengundang Ulama NU ke rumahnya. Banyak juga berita dari media online yang ditemukan meliputi berita perihal Wahidin Halim yang meminta restu pada Abuya Muhtadi. Pertemuan tersebut memuat perbincangan yang mengarah pada harapan Abuya Muhtadi terhadap Wahidin Halim dan Andika Hazrumy bilamana terpilih. Bahkan, Abuya Muhtadi seringkali mengajak Wahidin Halim serta Andika Hazrumy untuk berkeliling bertemu para Ulama di sejumlah kabupaten/kota (Jurnalline.com, 2017).

b. Hubungan Resiprositas (Saling Menguntungkan) Antara Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Ulama

Salah satu ciri dalam relasi patron klien yang terjadi pasti disebabkan oleh adanya rasa saling menguntungkan antara patron dan klien akibat perbedaan sumber daya yang ada. Selain dalam upaya mewujudkan kemaslahatan rakyat, pesantren sebagai jantungnya NU menjadi bentuk perjuangan dari para Ulama untuk terus mengembangkannya. Salah satunya melalui pendekatan dengan struktur, sehingga dengan ini mereka menganggap dapat dengan mudah untuk menyalurkan aspirasi perihal pesantren ketika calon yang diusung sudah menjadi politisi. Wahidin Halim dan Andika Hazrumy selaku patron jelas bergantung juga pada Ulama NU mengingat massa NU yang juga besar.

Berkaca pada hubungan resiprositas ini, ternyata posisi Ulama NU sebagai tokoh berpengaruh juga berusaha mendapatkan hubungan timbal balik lainnya melalui kebijakan selama pasangan

tersebut menjadi pejabat daerah. Upaya mewujudkan hubungan timbal balik ini menjadi sebuah politik pragmatik untuk kepentingan NU, pesantren, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai upaya mewujudkan semua itu, para Ulama NU dalam hal ini pun terlibat dalam penyaluran aspirasi untuk kebijakan yang dibuat.

Kemaslahatan yang didapatkan melalui dukungan yang diberikan adalah berupa adanya akses dalam bantuan pemberdayaan untuk organisasi NU, baik pemberian dari provinsi maupun Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Sebelum kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy lengser, Gedung Pengurus Wilayah NU (PWNU) Banten akhirnya dihibahkan oleh provinsi kepada NU dan secara resmi menjadi milik PWNU. Di sisi lain, para Ulama NU pun dapat meraih manfaat lainnya selama kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy berlangsung. Setidaknya mereka menikmati berbagai acara keagamaan serta acara organisasi mereka yang didanai oleh politisi terkait.

c. Hubungan Loyalitas Antara Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Ulama NU

Ulama NU dengan posisinya yang krusial dalam kehidupan masyarakat jelas memiliki massa dan seringkali menjadi target bagi para politisi untuk melakukan kerja sama. Massa yang dimiliki oleh Ulama tidak sedikit, dapat diraih dari santri pada pesantren yang dimilikinya ataupun pengikutnya dari majelis taklim. Tidak lupa dalam konteksnya NU, jelas sekali NU adalah kekuatan politik besar yang menjadikan partai yang didukung olehnya lebih cenderung akan menang, karena NU memang berperan andil. Hal demikian

masih dilakukan oleh organisasi tersebut pada Pilgub 2017 kemarin di Banten, walau mereka harus menghilangkan identitasnya sebagai NU sebab sebagaimana *khittah* NU, NU dilarang untuk terlibat pada politik praktis. *Khittah* NU di sini memiliki arti sebagai garis perjuangan NU yang isinya adalah pedoman berpikir serta bersikap bagi warga NU dalam berkhidmat di berbagai aspek.

Mengetahui basis massa yang banyak dari NU dan Ulama di dalamnya, juga dengan keterlibatan entitas terkait pada Pilgub di Banten kemarin. Tindakan tersebut terindikasi relasi patron-klien yang memang diperjuangkan oleh Ulama NU untuk kepentingan NU pesantren sebagai jantungnya. Sebagaimana variabel patron-klien menurut Scott (1972), hubungan loyalitas menjadi salah satu bagian dalam suatu relasi patron-klien akibat adanya ketimpangan sumber daya sosial ekonomi di antaranya.

3. Meninjau Relasi Patron Klien Antara Jawara dan Ulama dengan Masyarakat

- Relasi Patron Klien Antara Jawara dengan Masyarakat
- a. Hubungan Personal Antara Jawara dengan Masyarakat

Jawara dalam hubungan personalnya dengan masyarakat Banten adalah entitas yang dikenal berpengaruh karena berperan andil dalam sendi-sendi kehidupan. Akibat kultur kekuasaan, Jawara menjadi orang yang berpengaruh di lingkungannya masing-masing. Berpengaruh di sini dapat diartikan sebagai kekuatan yang dimilikinya, seperti dapat melindungi, dapat diandalkan, dan dapat diminta tolong untuk mengamankan sesuatu. Hal yang diutarakan seringkali didengar oleh

masyarakat, karena posisinya yang dikenal berpengaruh dan dekat dengan kekuasaan. Secara sosiologis, pihak yang bisa diandalkan di suatu lingkungan dapat ditunjuk sebagai sosok yang dipatuhi perintahnya.

Posisinya yang begitu berpengaruh ternyata dari TTKKDH maupun Cimande Macan Guling ini dapat menjadi patron di tengah masyarakat sekitarnya yang berperan sebagai klien. Hubungan ini bersifat luwes serta meluas bahkan dapat membentuk hubungan kerabat. Jelas sekali bilamana hubungan yang luwes ini tidak akan dibatasi waktu sebagaimana masa kerja. Melalui hubungan kerabat, masyarakat tidak akan sungkan jika memerlukan bantuan dan Jawara dapat membantu bilamana memang dibutuhkan.

b. Hubungan Resiprositas Antara Jawara dengan Masyarakat

Posisi ketergantungan hingga membuat adanya loyalitas menjadikan adanya ikatan emosional untuk membalas jasa dari Wahidin Halim dan Andika Hazrumy selaku patron. Ternyata, yang dilakukan oleh Jawara selaku patron dalam meraih massa di lapangan dapat berupa pemberian serangan fajar pada hari Pemilu melalui perantara yang dikirim oleh pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

Jaringan patron klien di antara Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara bekerja satu sama lain melalui praktik politik uang guna mendulang suara masyarakat. Dalam memastikan distribusi materi politik uang ini agar tepat sasaran adalah dengan menggunakan pola yang diperkirakan akan melancarkan aksinya. Salah satunya hal demikian dilakukan oleh Cimande Macan Guling di lapangan dengan melibatkan keluarga dan perangkat lingkungan, seperti

rukun tetangga (RT). Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum dalam setiap lingkup tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencari dukungan, karena broker (perantara) adalah orang yang dipilih karena telah mengetahui lebih dalam perihal kondisi sosial, budaya, politik, dan geografis daerah terkait. Broker dinilai berharga karena keterikatan sosial mereka berguna dalam memantau perilaku pemilih untuk menegakkan hubungan klientelistik (mutualisme) (Hicken dkk., 2017).

Jawara di sini sebagai agen perantara diyakini dapat mengontrol kepatuhan pemilih sebab Jawara jelas akan paham perihal kondisi sebenarnya di lapangan bilamana ada penerimaan materi untuk mendukung kandidat lain yang ditujukan. Demikian halnya, keterlibatan Jawara sebagai broker menjadi strategi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu Indonesia di tengah keberlangsungannya akibat penerapan sistem proporsional terbuka. Fenomena ini menjadi contoh dari politisi yang bersaing demi meraih suara hingga akhirnya menggunakan politik uang sebagai strategi kemenangannya. Tindakan demikian adalah tindakan yang disebut oleh Aspinall dan Berenschot (2019) sebagai “pertukaran eceran” untuk menggambarkan interaksi yang singkat ini.

Pada konteks hubungan Jawara dan masyarakat pada relasi transaksional ini adalah sebuah kepuasan sementara. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat pemilih mengeluhkan perihal politisi yang dipilihnya dalam hal ini Wahidin Halim dan Andika Hazrumy melupakannya. Pemberian *money politic* dalam Pemilu adalah sebuah interaksi singkat yang pada akhirnya melupakan hal substansial.

c. Hubungan Loyalitas Antara Jawara dengan Masyarakat

Salah satu tanda dari hubungan loyalitas dalam relasi patron klien adalah adanya kesepakatan tidak tertulis di antara keduanya yang menjadi sebuah hubungan personal. Namun, dalam konteks relasi Jawara dan masyarakat ini tidak ada kesepakatan formal yang menjadi catatan secara rigid perihal timbal balik yang akan diperoleh. Di sisi lain, masyarakat pun dapat melanggar permintaan Jawara untuk tidak memilih politisi terkait. Sebab posisi relasi ini sifatnya singkat dan lemah.

➤ Relasi Patron Klien Antara Ulama dengan Masyarakat

a. Hubungan Personal Antara Ulama dengan Masyarakat

Ulama dalam hubungan personalnya dengan masyarakat Banten adalah entitas yang dikenal sebagai guru dan pewaris nabi. Menurut Horikoshi (dalam Romli, 2007), hubungan patron klien tidak selalu perihal ketergantungan ekonomi, tetapi hal demikian juga berdasarkan ketergantungan yang bersifat inklusif dari segala bidang kehidupan, salah satunya dicontohkan oleh Horikoshi sebagaimana Ulama di tengah masyarakat. Posisi ini yang disebut sebagai bentuk dari kewibawaan tradisional. Kredibilitas tradisional ini bukan semacam imbalan yang tidak melibatkan hitungan keuntungan pribadi oleh pengikut. Bila kewibawaan ini dibawa, maka pengikut terdorong untuk patuh tanpa memikirkan kebutuhan keuangan. Posisi Kiai yang berpengaruh juga di tengah masyarakat Islam akan semakin besar bilamana posisinya dalam lembaga struktural keagamaan strategis.

b. Hubungan Resiprositas Antara Ulama dengan Masyarakat

Posisi adanya pemberian dari Wahidin Halim dan Andika Hazrumy

selaku patron membuat adanya loyalitas hingga terjadi ikatan emosional dari Ulama NU selaku klien untuk membalas jasa. Dalam kultur kalangan masyarakat Banten yang mayoritasnya beragama Islam, posisi Ulama adalah menjadi patron sedangkan santri dan jemaahnya sebagai klien. Pertukaran yang kemudian terjadi dapat berupa pengetahuan agama, tuntunan, panutan dan perlindungan yang diberikan oleh Ulama pada masyarakat yang dibalas dengan kepercayaan, kesetiaan dan dukungan. Tuntutan dan nasihat itu tidak terbatas pada hubungan keagamaan saja, melainkan bisa meluas ke hubungan sosial hingga politik. Salah satunya hal demikian dilakukan oleh para Ulama NU pada Pilgub 2017 di Banten dalam menyiarkan dukungannya terhadap santri dan masyarakat untuk mendukung Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

Bilamana menelisik nilai-nilai khas kepesantrenan menurut Manshur (2009), salah satu dari sendi-sendi kehidupan santri memuat restu Kiai. Nilai restu Kiai menjadi sebuah bentuk ketergantungan padanya oleh warga pesantren. Atas kondisi keistimewaan Kiai tersebut, Ulama yang memiliki pesantren atau biasa disebut sebagai Kiai pastinya adalah patron akibat posisinya yang berpengaruh. Posisi yang strategis ini membuat masyarakat Banten dengan mayoritas Islam mematuhi apa yang menjadi keputusannya, termasuk perihal keputusan politik. Bahkan, sikap hormat, *takzim* serta kepatuhan dalam dunia pesantren kepada Kiai adalah sebuah nilai utama yang patut ditanamkan pada santri. Pesantren dan majelis taklim menjadi wadah untuk menyatakan posisi suaranya terhadap masyarakat.

Dalam konteks ini, anggota NU yang di dalamnya memuat Kiai pada saat Pilgub

2017 di Banten kemarin turut terlibat dalam politik praktis. Namun demikian, pada hakikatnya bilamana Ormas ini menyatakan dukungan, maka secara tidak langsung anggota di dalamnya harus melepaskan identitasnya sebagai kalangan NU sebab mereka berpedoman kepada *khittah*. *Khittah* di sini memiliki arti sebagai pedoman bagi anggota NU dalam menjalankan berbagai aspek.

Pernyataan dukungan bagi Ulama dinyatakan pada para santri dan masyarakat dalam majelis taklim dengan menyiarkan pada mereka untuk memilih pilihannya. Posisi Ulama sebagai patron di tengah masyarakat lebih banyak mendapatkan massa dari majelis taklimnya. Sebab, massanya yang lebih banyak dibandingkan dengan santri dari pesantren dapat menjadi magnet elektoral tersendiri.

c. Hubungan Loyalitas Antara Ulama dengan Masyarakat

Hubungan loyalitas di sini memiliki makna sebagai kesetiaan ataupun kepatuhan. Hubungan loyalitas yang dimaksudkan dalam konteks Ulama dan masyarakat ini tidak ada kesepakatan formal yang menjadi catatan secara rigid perihal timbal balik yang akan diperoleh. Di sisi lain, masyarakat pun dapat memilih kandidat lain yang tidak direkomendasikan oleh Ulama untuk tidak memilih politisi terkait. Sebab posisi relasi ini sifatnya singkat dan lemah. Konteksnya dalam dunia pesantren, santri selaku peserta didik diantarkan menjadi seorang yang memiliki loyalitas serta pengabdian kepada Ulamanya. Alhasil, hubungan loyalitas di sini membuat masyarakat dalam wilayah strategis, yakni santri dan jemaahnya untuk patuh pada keputusan Ulama.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa relasi patron-klien yang terjadi di antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama memang terjadi. Pertukaran kepentingan antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy terjadi agar dapat menjaga loyalitas baik dari Jawara maupun Ulama. Relasi patron klien yang terjadi tergolong dalam pola piramida karena dipimpin oleh sosok patron (pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy) sebagai patron tertinggi dan melahirkan klien (Jawara dan Ulama) yang juga bisa menjadi patron bagi klien (masyarakat).

Terdapat ciri dari relasi patron klien yang dibangun oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumy bersama Jawara sebagaimana hubungan personal, resiprositas, dan loyalitas. **Pertama**, hubungan personal yang terbentuk antara Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara ternyata sudah dibangun oleh pendahulu Andika Hazrumy, yakni Tb. Chasan Sohib sebagai kakeknya yang merupakan seorang “Pendekar Banten” dan dihormati oleh kalangan Jawara. Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy tetap membangun hubungan dengan Jawara terkhususnya mendekati Pemilu. **Kedua**, hubungan resiprositas atau saling ketergantungan akibat ketimpangan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Jawara dengan keterbatasan ekonomi organisasi yang dimilikinya akhirnya membangun hubungan dengan politisi tersebut sebagai strategi untuk membuat organisasi tersebut berdaya. Selain pemberian dana pemberdayaan, pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy pun kerap mengadakan festival seni dan kegiatan persilatan lainnya yang tentu akan melibatkan para Jawara dan juga pemberian matras yang diberikan dari

dana APBD. **Ketiga**, hubungan loyalitas yang merupakan hubungan dibangun atas dasar kontrak politik yang telah dibuat. Kontrak politik terjadi di antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan isu yang dibawa oleh organisasi Jawara adalah kemaslahatan organisasinya dan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang ingin mendapatkan suara dari massa Jawara dan masyarakat.

Sama halnya dengan Jawara, mayoritas Ulama di Banten ini berperan dalam relasi patron klien pada Pilgub tahun 2017 di Banten untuk kemenangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, terutama Ulama NU. Terdapat ciri dari relasi patron klien yang dibangun oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. **Pertama**, hubungan personal yang dibangun khususnya untuk Ulama NU memang sudah dibangun oleh pendahulu Andika Hazrumy dan keterlibatan Andika Hazrumy dalam menjadi bagian dari Gerakan Pemuda Ansor NU. Lalu, hubungan personal tersebut semakin dibangun oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumy ketika mendekati Pemilu. **Kedua**, hubungan resiprositas yang terjadi merupakan hubungan akibat dari perjuangan mereka dalam membangun pesantren adalah salah satu hal yang dibawa dalam upayanya mendukung calon. Terutama NU, dengan dunia pesantren yang merupakan jantungnya. Pada masa pimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, terdapat pemberian berupa hibah kemandirian pesantren, pelatihan guru-guru, kebijakan-kebijakan tentang beasiswa, dan pembangunan infrastruktur pesantren. Hal yang dirasakan oleh Ulama lain pun didapatkan oleh mereka setidaknya dalam menikmati berbagai acara keagamaan serta acara organisasi mereka yang didanai oleh politisi terkait. NU pun sebagai organisasi

masyarakat dalam hubungan ini kerap mendapatkan dana pemberdayaan dari Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. **Ketiga**, hubungan loyalitas yang dibangun atas dasar kontrak politik. Catatan yang dibuat oleh para Ulama dalam memilih pasangan tersebut adalah pembangunan pesantren. Lebih khususnya untuk NU, organisasi tersebut menyertakan harapannya dalam program-program NU kedepan terhadap calon.

Baik Jawara maupun Ulama akhirnya berperan menjadi patron di tengah masyarakat. Dalam membangun loyalitasnya dari pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy selaku patron tertinggi, Jawara dan Ulama mengajak masyarakat sekitarnya untuk menjatuhkan pilihan terhadap pasangan tersebut. Adapun, dalam praktiknya ditemukan bahwa Jawara menyebarkan politik uang yang diberikan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy melalui perantaranya saat hari Pemilu. Sedangkan, Ulama yang memiliki pesantren dapat menyiarkan pilihannya kepada santri dan juga majelis taklim dalam menyatakan posisi dukungannya. Akhirnya, pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy berhasil menang dalam Pilgub 2017 Banten, karena salah satunya dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memobilisasi jaringan informal berupa Jawara dan Ulama yang memiliki kultural serta pengaruh kuat di kalangan masyarakat Banten.

Studi ini memberikan perspektif bahwa relasi patron-klien tidak hanya terjadi seputar pemberian barang atau uang dari patron pada klien. Melainkan, patron dapat membuat program kebijakan sebagaimana bentuk perjanjian untuk melindungi klien yang sudah terlibat kontrak politik dengannya. Di sisi lain, studi ini pun melengkapi beberapa studi sebelumnya

yang memang memiliki fokus terhadap distribusi dari relasi patron-klien yang justru paling banyak terjadi di luarstruktur partai, yakni melalui jejaring informal.

SARAN

Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Masih diperlukan studi dalam ilmu sosial lebih lanjut perihal kritiknya terhadap relasi patron-klien dalam pemilihan umum.
2. Kekurangan dalam mendapatkan akses informasi perihal pemberian secara personal yang terjadi pada tokoh strategis Jawara maupun Ulama dari Wahidin Halim dan Andika Hazrumy pada penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya untuk mendapatkan informasi tersebut.
3. Studi yang turut melengkapi nantinya diharapkan akan memperkaya referensi akademis serta memberikan referensi dalam memperbaiki keberlangsungan Pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, I., Harsasto, P., & Fitriyah, F. (2019). Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 12-23.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Asshiddiqie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 6-27.
- Asshiddiqie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 6-27.
- Bultmann, D. (2018). Insurgent Groups During Post-Conflict Transformation: The Case of Military Strongmen in Cambodia. *Civil Wars*, 20(1), 24-44.
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18(2).
- Fajriyah, N. N. (2019). Relasi Elit dalam Pemenangan Caleg DPR-RI Partai Nasdem H. Charles Meikyansah Di Dapil Iv Jember-Lumajang Pada Pemilu 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Hamid, A. (2010). Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. *Politika, Jurnal Ilmu Politik*, 1(2).
- Hidayat, D. T. (2021). Relasi Bisnis dan Politik dalam Pemilu (Studi Kasus Kemenangan Partai Gerindra Pada Pileg 2019 Di Kota Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- KPU Provinsi Banten No. 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara &

- Hasil Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017.
- Lubis, M. (2016). Kewenangan Bawaslu/Panwaslu dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia Terkait Dengan Revisi Undang-Undang Pilkada. *Makalah Tentang Evaluasi Pilkada*.
- Marijan, K. (2007). Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu, dan Sistem Keptaraan: Pidato Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Perbandingan Sistem Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Desember 2007.
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167-184.
- Pribadi, Y. (2011). Strongmen and Religious Leaders in Java: Their Dynamic Relationship in Search of Power. *Jurnal Al-Jamiah*, 49(1), 159-190.
- Puri, N. (2018). *Strategi dan model kampanye Wahidin Halim-Andika Hazrumy pada pilgub Banten 2017* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
- Saragintan, A., & Hidayat, S. (2017). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011. *Jurnal Politik*, 2(1), 137-164.
- Sardini, N. H. (2011). Restorasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Fajar Media. Press: Yogyakarta
- Asyhadie, K. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Indonesia: Prenadamedia Group, Divisi Kencana.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American political science review*, 66(1), 91-113.
- Sutisna, A. (2017). Gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100-120.
- Syauket, A. (2021). Buku Referensi dengan Judul "OCTOPUSSY Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten".
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Yıldırım, Kerem; Kitschelt, Herbert (2020). Analytical perspectives on varieties of clientelism. *Democratization*, 27(1), 20-43.